

**PERANAN PEMUKA PENDAPAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILU 1997 DI KECAMATAN BARUS JAHE
KABUPATEN DATI II KARO**

Oleh :

Zulkarnain Rangkuti

No. Stb. : 90 850 0144

NIRM : 901038000136



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
1998**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

PERANAN PEMUKA PENDAPAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU 1997
DI KECAMATAN BARUS JAHE KABUPATEN DATI II KARO

N A M A : ZULKARNAIN RANGKUTI
STAMBUK : 90 850 0144
N I R M : 901038000136

Menyetujui :
Dosen Pembimbing


Hj. Aminatun Nst. SH.
Pembimbing I


Drs. Heri Kusmanto, MA.
Pembimbing II

Mengetahui :

Ketua Jurusan


(Hj. Aminatun Nst. SH.)



D e k a n


(Drs. M. Rusli Nst. Bc. AP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

A B S T R A K S I

PERANAN PEMUKA PENDAPAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMI-
LIHAN UMUM 1997 DI KECAMATAN BARUS JAHE -
KABUPATEN DATI II KARO

O L E H

ZULKARNAIN RANGKUTI

NIM : 90.850.0144

NIRM : 90.103.800.0136

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

Di Indonesia metode pemilihan umum dipakai sistim perwakilan berimbang, yang berarti bahwa setiap organisasi peserta pemilu memperoleh sejumlah kursi sesuai dengan suara yang didapat.

Yang dimaksud dalam konteks ini adalah metode pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu, karena dalam pemilu terdapat tiga kekuatan organisasi peserta pemilu yang pada hakikatnya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian ditangan merekalah terletak harapan dan keinginan masyarakat, yaitu akan menetapkan GBHN sebagai landasan berpijak selama lima tahun.

Sejalan dengan sistim perwakilan berimbang tersebut di atas, maka baik Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia berlomba-lomba untuk merebut simpati masyarakat, dengan harapan agar memberi dukungan kepada partainya. Dalam proses merebut simpati inilah peran komunikasi sangat diperlukan, karena penduduk Indonesia 80 % tinggal dipedesaan yang menjadi sasaran setiap kontestan. Dengan demikian dibutuhkan penelitian yang seksama tentang metode pendekatan yang efektif untuk meraih

UNIVERSITAS MEDAN AREA
simpati masyarakat.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penelitian ini secara khusus mempelajari saluran yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dalam hal ini peran pemuka pendapat dengan segala informasi yang dimilikinya, mempunyai pengaruh yang besar di desa.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : "Peranan Pemuka Pendapat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 1997 Di Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Dati II Karo".

Penyelesaian skripsi ini dapat terwujud tiada lain karena bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

1. Bapak Drs. M. Rusli Nasution, Bc. AP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Hj. Aminatun Nst. SH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Heri Kusmanto MA., selaku Pembimbing II. yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh staff pengajar dan pegawai di FISIPOL UMA yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Surya Parangin-angin SH., selaku Camat Kec. Barus Jahe yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menmgambil data tentang segala sesuatunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Istri tercinta, Srianna Salmah dan ananda tersayang : Rizal Luthfi Rangkuti, Rifqi Fahmi Rangkuti, dan Naufal Fadly Rangkuti yang merupakan sumber motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua penulis : Marzuki Rangkuti, Mahmud dan Ibunda Nurmina, yang turut memberikan dorongan bagi penulisan skripsi ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, juga penulis ucapkan terima kasih, kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Di samping itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan penulisan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Medan, Desember 1997

Penulis,

Zulkarnain Rangkuti

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Hipotesis	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Ilmu Komunikasi	13
B. Pengertian dan Peranan Pemuka Pendapat ..	16
C. Pengertian Partisipasi Politik	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARUS JAHE	26
A. Letak Kecamatan	26
B. Jumlah dan Komposisi Penduduk	26
C. Sosial Budaya	31
D. Keadaan Alam	31
E. Keadaan Pemilu 1997	32
BAB V. PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA	33

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

iii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Teks	Hal.
I.	Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Umur	27
II.	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	28
III.	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	29
IV.	Komposisi Penduduk Menurut Agama	30
V.	Komposisi Penduduk di Desa Sampel	34
VI.	Komposisi Umur Responden	35
VII.	Tingkat Pendidikan Responden	36
VIII.	Jenis Pekerjaan Responden	36
IX.	Frekwensi Responden Dalam Meminta Nasehat Kepada Seseorang Jika Menemui Sesuatu Masalah.	37
X.	Pengakuan Responden Terhadap Kepemimpinan Desa Sebagai Pemberi Nasehat	38
XI.	Penilaian Responden Terhadap Kawan-kawannya Yang Meminta Nasehat Kepada Pemuka Pendapat	39
XII.	Penilaian Responden Terhadap Kepemimpinan Pemuka Pendapat	39
XIII.	Pengetahuan Responden Tentang Pemilihan Umum	41
XIV.	Media Informasi Pemilihan Umum Yang Dipakai Responden	41
XV.	Frekwensi Kampanye di Desa	42
XVI.	Pelaksanaan Kampanye di Desa	43
XVII.	Frekwensi Responden Mengikuti Kampanye di Desa	44
XVIII.	Frekwensi Responden Yang Mengikuti Kampanye di Luar Desa	45
XIX.	Penilaian Responden Terhadap Pengaruh Kampanye Terhadap Keputusan Pemilih	45

XX.	Penilaian Responden Terhadap Masyarakat Desa Yang Memberi Penerangan Pemilu	46
XXI.	Frekwensi Responden dalam Mendiskusikan Kampanye	47
XXII.	Frekwensi Responden Dalam Mempengaruhi Masyarakat Pemilih Dalam Masa Kampanye	48
XXIII.	Frekwensi Responden Dipengaruhi Dalam Pemilihan Umum	49
XXIV.	Frekwensi Responden Mencari Informasi Pemilihan Umum Melalui Media Radio	49
XXV.	Frekwensi Responden Mencari Informasi Pemilihan Melalui Media Cetak	50
XXVI.	Frekwensi Responden Mencari Informasi Pemilihan Umum Melalui Media Televisi	51
XXVII.	Frekwensi Responden Meneruskan Informasi Pemilihan Umum Yang Didapat Dari Media Massa .	52
XXVIII.	Frekwensi Pemuka Pendapat Menyebarkan Informasi	53
XXIX.	Pengakuan Responden Terhadap Pemuka Pendapat	53
XXX.	Pengakuan Responden Terhadap Tindakan Pemuka Pendapat Apabila Tidak Dituruti	55
XXXI.	Penilaian Responden Terhadap Terbentuknya Pengaruh Pemuka Pendapat	56
XXXII.	Tingkat Pengaruh Media Massa Dalam Menentukan Pilihan Responden	56
XXXIII.	Tingkat Pengaruh Interaksi Masyarakat Dalam Menentukan Pilihan	57
XXXIV.	Penilaian Responden Terhadap Kepemimpinan Pemuka Pendapat	58
XXXV.	Frekwensi Responden Mengadakan Diskusi Dalam Setiap Persoalan	59
XXXVI.	Tingkat Pengaruh Juru Kampanye Dari Luar Desa Responden	60
XXXVII.	Perbandingan Pengaruh Media Massa Dengan	

XXXVIII. Perbandingan Pengaruh Pemuka Pendapat Di Desa Dengan Juru Kampanye Dari Luar Desa ...	62
XXXIX. Penilaian Responden Dalam Penentuan Pilihan Dalam Pemilihan Umum	63
XXXX. Frekwensi Pemuka Pendapat Dalam Menggerakkan Masyarakat	64
XXXI. Tingkat Partisipasi Responden Dalam Kampanye	65
XXXII. Tingkat Partisipasi Responden Dalam Menem- peli Gambar OPP	65



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum salah satu sila dari dasar negara Pancasila : "Kerakyatan" atau demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah utusan utusan daerah dan wakil-wakil golongan fungsional. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat merupakan inti dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan inti dari Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah karena seluruh anggota Dewan perwakilan Rakyat adalah sekaligus sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dua kedudukan yaitu sebagai badan/lembaga tinggi negara dan sebagai badan/lembaga tertinggi negara (Majelis). Sebagai badan/lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat badan ini bertugas mengangkat Presiden dan menetapkan GBHN, dan pada sisi lain, statusnya sebagai anggota DPR dihadapkan pada tugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif. Dengan kedua kedudukan ini, maka jelas tergambar betapa besar peranan dan pengaruhnya dalam menentukan arah dan kebijaksanaan negara.

S. Pamuji mengatakan terdapat dua cara untuk menetapkan anggota MPR/DPR, yaitu "melalui Pemilihan Umum dan melalui pengangkatan". 1)

Dalam pemilihan umum terdapat tiga persoalan pokok yaitu :

- a. Siapa yang berhak memilih
- b. Siapa yang berhak dipilih
- c. Bagaimana cara pemilihan itu

Pemilih adalah masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pemilu. Warga negara yang dipilih adalah warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan ditentukan oleh partai atau organisasi sosial politik yang diikutinya. Sedangkan metode pemilihan adalah sistem perwakilan berimbang. Hal ini berarti, bahwa setiap organisasi peserta pemilihan umum bertarung memperebutkan sejumlah kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat dalam Pemilu.

Jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menentukan jumlah anggota, maka baik Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suara dengan hasil yang optimal. Proses pengumpulan suara ini akan

1). S. Pamuji, Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 41.

melahirkan kontak komunikasi antara orang yang dipilih dengan organisasi sosial politiknya dengan masyarakat pemilih. Masa inilah yang disebut kampanye politik.

Pada masa kampanye, peranan komunikasi sangat dibutuhkan karena pada hakekatnya dalam kampanye setiap organisasi peserta pemilu berusaha menyampaikan pesan-pesan politik berupa program-program yang telah dirancang sedemikian rupa kepada publiknya, dan diusahakan supaya publiknya memberikan umpan balik yang positif. Pesan-pesan politik itu disampaikan melalui berbagai media, seperti : Televisi, Radio, Surat Kabar, rapat umum, komunikasi kelompok di kedai-kedai dan juga melalui kontak pribadi.

Selama masa kampanye, setiap organisasi peserta pemilu secara bergantian mengisi siaran televisi untuk menyampaikan program-programnya kepada halayak. Sementara di lapangan terbuka diadakan rapat umum, dimana sang kandidat dengan perangkatnya hadir berpidato di hadapan massa. Kemudian setelah kesemuanya itu berlangsung lahir-lah komunikasi antar persona diantara masyarakat pemilih untuk membicarakan peristiwa di atas.

Kenyataan yang telah diuraikan di atas secara kuantitas lebih banyak terjadi di kota dari pada di desa. Karena di kota perangkat media massa lebih memadai serta situasi lalulintas yang mendukung untuk dapat bertemu antara tokoh partai dengan masyarakat. Di desa hal ini masih minim, selain itu karakteristik desa adalah lain dengan realitas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/24

sosial di kota. Namun harus dipikirkan bahwa masyarakat pemilih jauh lebih banyak di desa dan mereka inilah yang menjadi sasaran setiap organisasi pemilu.

Organisasi peserta pemilu senantiasa mencari metode yang cocok, supaya dapat menguasai masyarakat desa. Tentu pertama-tama melihat sistem komunikasi yang ada di desa. Berpijak dari sinilah akan dapat dijejaki rantai komunikasi. Di desa atau di kota terdapat pemuka pendapat baik formal maupun informal. Pemuka pendapat ini mampu mempengaruhi kelompoknya.

Michael Rush dan Phillif Althoff mengatakan bahwa pemuka pendapat terdapat pada semua lapisan dan kelompok masyarakat, dimana pemuka pendapat dengan segala informasi yang dimilikinya mampu merangkul masyarakat. 2)

Michael Rush dan Phillif Althoff selanjutnya mengatakan, bahwa masyarakat dalam memberikan suara didahului dengan diskusi bersama kelompok, dan pada saat inilah pemuka pendapat hadir.

Pemuka pendapat menghimpun informasi apakah melalui media massa ataupun dari orang-orang tertentu, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat dalam jangkauan kekuasaannya. Hal inilah yang disebut Lazarsfeld sebagai

2). Michael Rush dan Phillif Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa, Kartini Kartono, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 263.

"two step flow communication". 3) Namun informasi yang diperoleh masyarakat dari pemuka pendapat belum terus berhenti, tetapi masih dibicarakannya lagi dengan kawan-kawannya.

Keperkasaan pemuka pendapat ini tidak perlu lagi diragukan, karena ia sangat dekat dengan masyarakat dan diyakini, karena itu sangatlah tepat bila program pembangunan yang seyogianya diketahui oleh masyarakat dapat disalurkan melalui pemuka pendapat.

Pemilihan umum sebagai salah satu bidang pembangunan politik dapat mencapai sukses dengan memakai pemuka pendapat secara optimal.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 mengisyaratkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu bentuk partisipasi adalah partisipasi politik, dimana segenap anggota masyarakat yang sadar akan eksistensinya sebagai warga negara, harus mengadakan partisipasi politik meskipun lewat jalur yang paling sederhana.

K.H. Zuhri mengatakan : Politik pada hakekatnya membangun karakter bangsa sebagai kesatuan potensi Nasional untuk memecahkan berbagai problem yang lahir dari berbagai kepentingan masyarakat majemuk". 4)

3). Ibid, hal. 262

4). K.H. Zuhri, Kaleidoskop Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 109

Tidak jarang politik menjumpai hal-hal yang sebenarnya mungkin terjadi tetapi tidak terjadi dan sebaliknya hal-hal yang tidak mungkin terjadi tetapi terjadi.

Melihat kemutlakan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional dan partisipasi itu tidak mungkin lahir tanpa diketahui apa yang harus dikerjakan, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan merumuskan judul "Peranan Pemuka Pendapat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 1997 di Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Dati II Karo".

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan masalah yang diajukan dalam tulisan ini dapat lebih terarah, maka penulis perlu memberikan perumusan masalah. Oleh karena itu perumusan yang penulis berikan dalam masalah ini adalah : "Bagaimana peranan pemuka pendapat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu".

C. Pembatasan Masalah

Bila setiap variabel yang terdapat pada penulisan ini diuraikan secara rinci, maka dapat ditarik berbagai masalah, dari masalah itu pula masih mungkin lahir masalah baru. Dengan demikian akan terkumpul bermacam permasalahan dan pada akhirnya akan menyimpulkan penyimpangan dari tujuan pokok penelitian ini. Untuk itulah penulis memberikan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini menggunakan analisis komunikator,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

karena itu tendensinya diarahkan pada karakteristik dan peranan dari komunikatornya, dalam hal ini pemuka pendapat (opinion leader), dimana ia berfungsi sebagai gate keeper dan sekaligus agent of changes dalam masyarakat.

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan pemuka pendapat terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
2. Peranan pemuka pendapat dalam menjembatani dan mengantarai berbagai pilihan dan kepentingan masyarakat dalam pemilu.
3. Media apa saja yang berpengaruh dalam memberikan informasi kepada halayak tentang segala sesuatunya mengenai pemilu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai peranan pemuka pendapat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui besarnya volume informasi kampanye yang disampaikan kepada masyarakat melalui pemuka pendapat.
- b. Untuk mendapatkan data tentang karakteristik dan keperkasaan pemuka pendapat di dalam masyarakat khususnya desa.
- c. Memperoleh data tentang pemilu 1997 sekaligus sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

barometer kesadaran politik masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak atau instansi terkait yang memerlukannya.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pemilu, karena untuk mendapatkan kursi di DPR Pusat, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, adalah tergantung dari jumlah suara pemilih. Di Negara Republik Indonesia pemilih kebanyakan tinggal di desa-desa, karena itulah peranan pemuka pendapat sangat dibutuhkan sekali, karena yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat adalah pemuka pendapat yang pada umumnya tinggal di desa-desa.

Jadi salah satu cara untuk menarik simpati dan mempengaruhi masyarakat desa, maka peserta kontestan harus terlebih dahulu membujuk dan menarik simpati pemuka pendapat desa untuk bekerja sama dalam menarik simpati masyarakat desa tersebut.

Pemuka pendapat dalam usahanya untuk mempengaruhi masyarakat desa, harus melakukan suatu cara yaitu dengan

mengadakan komunikasi. Bila mana kita mengadakan komunikasi, itu berarti kita mencoba untuk membentuk persamaan dengan orang lain, yakni kita mencoba membagi informasi, ide atau suatu sikap. Jadi essensi dari komunikasi itu ialah si penerima dan si pengirim dapat melakukan bersama-sama isi pesan yang khusus. Jadi disini dapat dilihat bahwa komunikator berusaha saling menukar informasi dengan komunikannya dan keduanya mencoba membangun persamaan, bagaimana supaya informasi, ide ataupun sikap yang ditawarkan oleh komunikator dapat dimengerti oleh komunikan.

Merubah tingkah laku komunikan adalah bukan pekerjaan yang mudah, tetapi harus melalui proses yang membutuhkan kemampuan komunikator yang adaptif dalam menghadapinya. Pernyataan yang disampaikan kepada komunikan tidak secara otomatis menimbulkan persamaan diantara mereka yang melakukan komunikasi. Bila keduanya kebetulan memiliki persamaan persepsi maka komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar, tetapi bila perbedaan yang membentangi antara mereka, maka komunikasi tidak akan berjalan lancar dan perubahan tingkah laku komunikan belumlah tercipta.

Sebelum komunikan mengalami perubahan sikap dan tingkah laku maka komunikator harus meyakinkannya lagi, supaya komunikan dapat menerima suatu yang diusulkan. Disinilah tugas yang harus dilakukan oleh pemuka pendapat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/24

karena pemuka pendapat yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat dan yang lebih dipercaya. Jadi disini dapat dikatakan bahwa yang paling mengetahui keinginan dan sifat-sifat dari masyarakat itu adalah pemuka pendapat desa tersebut.

Proses komunikasi dapat juga dipergunakan dalam mengemudikan perilaku pihak lain atau komunikan. Melalui proses komunikasi ini pihak komunikator dapat memaksakan kehendaknya kepada komunikan untuk menerima dan mematuhi pesan dalam arti harus dijadikan milik bersama dan demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan.

Dalam usaha menjadikan pengertian/isi dan pesan menjadi milik bersama dengan efektif, Astrid, S. Susanto mengatakan :

... harus dilakukan melalui dan memanfaatkan sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Pesan yang diberikan itu harus terlebih dahulu dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tata nilai masyarakat yang menjadi sosial control dalam tindak tanduk masyarakat, maka masyarakat sebagai komunikan akan menerima pesan itu, dan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya, setelah pesan itu menggejala dalam kegiatan hidupnya sehari-hari. 5)

Dari uraian di atas dapatlah penulis menarik suatu kesimpulan bahwa yang paling berpengaruh terhadap masyarakat desa adalah pemuka pendapat. Jadi untuk menarik dan mempengaruhi masyarakat desa dalam pemilihan umum tahun

5). Astrid, S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek, Bimacipta, Bandung, 1977.

1997 ini, pertama-tama yang harus didekati oleh peserta kontestan adalah pemuka pendapat yang ada di desa tersebut dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam membujuk dan mempengaruhi serta menarik simpatik dari masyarakat desa tersebut, karena pemuka pendapatlah yang paling dipercayai oleh masyarakat desa tersebut.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah.

Sutrisno Hadi mengatakan:

Dia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkan penolakan penerimaan hipotesis. Dengan demikian sangat tergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang disimpulkan". 6)

Walaupun hipotesis masih anggapan yang harus dibuktikan kebenarannya, tetapi hipotesis dalam proses penelitian sangat berguna. Dalam membahas peranan pemuka pendapat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

6). Sutrisno Hadi, Metode Riset, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 19.

sebagai berikut : "Jika kontak personal antara pemuka pendapat dengan masyarakat dalam pemilu besar maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tahun 1997 akan besar pula".



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ilmu Komunikasi

Wahyudi mengatakan :

Komunikasi berasal dari bahasa Latin *Communis*, *common*. Bilamana kita mengadakan komunikasi, itu artinya kita mencoba untuk membentuk persamaan dengan orang lain, yakni kita mencoba membagi informasi, ide atau suatu sikap. Jadi esensi dari komunikasi itu ialah sipenerima dan sipengirim dapat melakukan kerja sama untuk membangun persamaan tentang isi pesan yang khusus. 7)

Dari batasan komunikasi Wahyudi ini dapat dilihat bahwa komunikator berusaha saling menukar informasi dengan komunikannya dan keduanya mencoba membangun persamaan, bagaimana supaya informasi, ide ataupun sikap yang ditawarkan oleh komunikator dapat dimengerti oleh komunikan.

Onong U. Effendy mengatakan "To modify the behaviour of other individuals" dalam definisi Hovland, mengatakan bahwa " komunikasi yang menjadi garapan ilmu komunikasi adalah komunikasi yang bertujuan, yakni merubah tingkah laku manusia". 8)

Merubah tingkah laku komunikan bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi harus melalui proses yang membutuhkan kemampuan komunikator yang adaptif dalam menghadapi komu-

7). Wahyudi, Jurnalistik Televisi, Alumni, Bandung, 1986.

8). Onong U, Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi Alumni, Bandung, 1981.

nikannya. Pertanyaan yang disampaikan kepada komunikan tidak secara otomatis menimbulkan pertemuan atau persamaan diantara mereka yang melakukan komunikasi. Bila keduanya kebetulan memiliki banyak persamaan dalam pendapat maka komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tetapi bila perbedaan yang membentangi antara mereka, maka komunikasi tidak akan berjalan dan perubahan tingkah laku komunikan belum tercapai.

A. Fisher mengatakan defenisi komunikasi sebagai berikut : "komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya, melalui penggunaan simbol kata, gambar, grafik dan lain-lain." 9)

Dari rumusan defenisi ini nampak bahwa komunikasi dalam merubah sikap dan tingkah laku komunikan, bukan saja hanya membenarkan cara yang positif seperti menimbulkan rasa senang, tetapi juga cara paksa, supaya pihak komunikan menuruti kehendak komunikator. Jika hal ini dibawa dalam pemilu, maka pihak komunikan (masyarakat pemilih) sebagai sasaran komunikasi mungkin saja menerima pesan politik tertentu, tetapi mungkin juga melalui metode persuasif.

Lathief Rousydi menyatakan:

Bilamana interaksi sosial meliputi pengoperan arti-arti dengan jalan menggunakan lambang-lambang, maka

9). A. Feisher, Teori-Teori Komunikasi, Penyunting, Rakhmad, Jalaluddin, Remaja Karya, Bandung, 1988.

ini dinamakan komunikasi. Dengan demikian komunikasi terjadi bila terdapat interaksi sosial, dimana orang yang terpaut dalam interaksi sosial itu menyatakan maksudnya melalui lambang-lambang, karenanya tercipta persamaan arti diantara mereka".¹⁰⁾

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan :

1. Proses pemindahan yang menimbulkan persamaan pengertian dalam menghadapi suatu isi pesan.
2. Proses pemindahan tersebut menyangkut suatu subyek bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu pihak ke pihak lain. Subyek tersebut dapat berupa lambang yang berarti, perangsang, informasi, ide atau sikap.
3. Kegiatan dari dua orang atau lebih dapat berupa kelompok perorangan, lembaga atau masyarakat.
4. Dalam penyampaian pesan terdapat hambatan.
5. Komunikasi bertujuan merubah tingkah laku seseorang dan membangun kebersamaan, pengertian yang sama tentang sesuatu isi pesan.
6. Penyampaian pernyataan, dapat secara langsung atau bermedia.
7. Komunikasi berlangsung secara vertikal dan horizontal.

10). Lathief, TA, Rousydiy, Dasar-dasar Rethirika Komunikasi Dan Informasi, Rimbow, Medan, 1985.

B. Pengertian Dan Peranan Pemuka Pendapat

Rakyat Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan diharapkan berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek pembangunan. Partisipasi itu juga merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional. Namun hal itu tidak lahir tanpa adanya komunikasi pemerintah dengan rakyat dan itu perlu diketahui saluran apa yang ideal diperlukan dalam menyebarluaskan pesan/program pembangunan. Dengan demikian perlu dicari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang bertautan dengannya yang dalam hal ini tentu peran ilmu komunikasi.

Misalnya istilah pemuka pendapat sebagai sumber informasi, yang diajukan oleh Paul Lazarsfeld dalam Edward Depari yang memperkenalkan model komunikasi dua tahap. Studi yang mereka lakukan mencoba untuk mengetahui seberapa jauh mass media berperan dalam perubahan. Hasilnya mengejutkan, mengingat bahwa pengaruh media massa kecil sekali, orang lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi dalam menentukan keputusan politiknya dari pada dipengaruhi mass media. Selain itu hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa ide atau pemikiran senantiasa tersebar melalui radio dan media cetak dan diterima oleh pemuka pendapat, dan melalui pemuka pendapat inilah ide tersebut tersebar ke seluruh masyarakat.

Edward Depari mengatakan:

Pemuka pendapat sebenarnya bukan hanya menerima informasi dari mass media, tetapi juga melalui saluran-saluran yang bukan media massa, dan bukan hanya dua tahap proses penyampaian pesan, itu tetapi two or more step flow of communication .¹¹⁾

Namun demikian harus diakui, bahwa pemuka pendapat sangat cocok dipergunakan sebagai duta-duta pembangunan terutama di tengah-tengah masyarakat yang masih berkembang dalam arti tinggal di pedesaan. Karena selain perangkat media massa yang relatif sedikit juga disebabkan praktek komunikasi antar pesona yang hidup dan terpelihara dalam suasana kekeluargaan di desa.

Beberapa pemuka pendapat mengambil prakarsa dalam komunikasi dan sebaliknya banyak anggota masyarakat menemui pemuka pendapat untuk meminta informasi, selain itu ternyata pula bahwa baik pemuka pendapat maupun masyarakat sama-sama dapat berperan secara aktif maupun pasif.

Edward Depari merumuskan karakteristik pemuka pendapat sebagai berikut :

1. Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota masyarakat.
2. Lebih tinggi status sosial serta status ekonominya.
3. Lebih innovative dalam menerima atau mengadopsi idea baru.

11). Edward Depari, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.

4. Lebih tinggi pengenalan medianya.
5. Kemampuan simpati mereka lebih besar.
6. Partisipasi sosial mereka lebih besar.
7. Lebih cosmopolit. 12)

Selanjutnya Depari mengatakan, ada tiga metode utama dalam mengukur kepentingan pemuka pendapat, yaitu :

1. Sociometric method
Dalam metode ini pada masyarakat ditanyakan kepada siapa mereka minta atau mencari informasi atau nasehat mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. Pemimpin dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menjadi anggota masyarakat tersebut memiliki informasi terbanyak.
2. Informan's rating
Dalam metode ini diajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu pada orang-orang/responden yang dianggap sebagai "key informan's" dalam masyarakat mengenai siapa dianggap masyarakat umum sebagai pemimpin mereka.
3. Self designating method
Dalam metode ini pada setiap responden diajukan rangkaian pertanyaan untuk menentukan dalam tingkat-tingkat mana ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakat. 13)

Edward Depari menyebutkan bahwa seorang pemuka pendapat akan senantiasa memelihara nilai-nilai serta norma-norma kelompoknya sebagai syarat minimal dalam mempertahankan statusnya. 14)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa peran pemuka pendapat sangatlah vital dalam mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat. Karena itu sangatlah tepat jika ia dirangkul baik oleh organisasi peserta pemilu di

12). Ibid

13). Ibid

14). Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/24

dalam melancarkan pengaruhnya dalam pemilu, maupun dalam pemerintahan memasyarakatkan program pembangunan.

C. Pengertian Partisipasi Politik

Everett M. Rogers mengatakan : dalam pembangunan terdapat berbagai unsur, antara lain :

1. Pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial ekonomi dan sebagainya.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, biasanya dibarengi dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan tersebut di pedesaan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dianggap penting. 15)

Bintoro Tjokromidjojo mengatakan, bahwa "terlibatnya dan ikut sertanya rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. 16)

Dalam masyarakat demokrasi maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan,

15). Everett M, Rogers, Komunikasi Dan Pembangunan, LP3ES, 1986.

16). Bintoro Tjokromidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, 1986.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

bahwa partisipasi masyarakat bukan saja penting tetapi merupakan syarat mutlak dalam keberhasilan pembangunan. Jika kita melihat partisipasi itu dari sudut proses, maka akan nampak beberapa unsur yang berperan di dalamnya, yaitu : komunikasi dalam arti penyampaian pesan, kemudian akan membentuk sikap pada akhirnya akan melahirkan partisipasi.

Pada uraian di muka telah dijelaskan tentang bagaimana pesan itu berlangsung, sekarang perlu dirumuskan pengertian dari sikap supaya nantinya ada ketegasan dalam pengamalannya menjadi partisipasi.

W.A. Gerungan (Santoso Sasrosapoetro, 1987) mengatakan sikap adalah sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan beraksi terhadap satu hal. Sikap senantiasa terarahkan terhadap satu hal, suatu objek, tidak ada sikap tanpa ada objek.

Selanjutnya Gerungan membedakan dua sikap yang berbeda yakni sikap individu dan sikap sosial.

Sikap individu dimiliki seseorang misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu, ia berkenan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial.

Sikap sosial menyebabkan terjadinya tingkah laku yang khas dan berulang-ulang terhadap objek sosial dan karena itu sikap sosial turut merupakan faktor penggerak intern di dalam pribadi orang yang mendorongnya berbuat dengan cara tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

Jika kita ambil objek dari sikap itu adalah politik dalam suasana pemilu, maka pada individu maupun masyarakat akan timbul sikap politik yang ditunjukkan pada pemilu. Hal inilah yang akan menentukan kadar partisipasi politik.

Meriam Budiardjo mengatakan, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. 17)

Karena ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilu menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan atau anggota parlemen dan sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengatakan : partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan-pembuatan oleh pemerintah, partisipasi bisa individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekuasaan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.18)

Memang kenyataan benar apa yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson, karena pada beberapa negara peralihan kekuasaan itu kadang-kadang ditempuh dengan kudeta, atau demonstrasi untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Misalnya saja pembunuhan yang dilakukan oleh

17). Meriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai politik, Gramedia, Jakarta, 1982.

18). Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam buku Meriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, 1982.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

Gerakan 30 September/PKI di Indonesia, dimana mereka membunuh tokoh-tokoh penting ABRI dengan maksud supaya mereka yang berkuasa sekaligus menggantikan ideologi negara. Cara itu illegal dilakukan berkelompok dan bukan pula secara sukarela tetapi mereka memaksa.

Namun perlu digaris bawahi ialah bahwa masyarakat tidak sekaligus berada pada posisi yang sama dalam partisipasi politik.

Luas dari partisipasi politik berbeda-beda dalam suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya, lagi pula mereka akan berbeda di dalam suatu sistem menurut waktunya, seperti uraian Michael Rush berikut ini :

1. Dalam masyarakat primitif, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, pada umumnya partisipasi condong tinggi dan sulit untuk membedakannya dari kegiatan lain.
2. Pada masyarakat berkembang, partisipasi masyarakat dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek hurup dan masalah umum dari demokrasi.
3. Dalam masyarakat totaliter : Dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi dan mungkin juga sangat rendah pada bagian yang lainnya. Namun partisipasi politik itu senantiasa dikontrol. ¹⁹⁾

Negara Indonesia digolongkan pada negara yang sedang berkembang. Jadi hal ini kita pakai sebagai konsepnya,

19). Michael Rush dan Althoff Philip, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa, Kartono Kartini, Rajawali Jakarta, 1986.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

maka orang yang melek huruf itu boleh saja dikategorikan sebagai pemuka pendapat, aktif dalam berpartisipasi serta menyebarluaskan pesan politik.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Winarto Surakhmad mengatakan :

Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginter-pretasikannya".
20)

Hal-hal yang diperhatikan ialah :

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Barus Jahe yang telah ikut memilih pada pemilu yang baru berlangsung pada tanggal 29 Mei 1997.

b. Sampel Area

Sampel Area dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Barus Jahe.

c. Sampel Populasi

Sampel Populasi adalah masyarakat Kecamatan Barus Jahe, namun penulis hanya mengambil tiga desa menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini. Adapun desa yang dimaksud adalah :

20). Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1982.

1. Desa Serdang
2. Desa Bulan Jahe
3. Desa Suka Julu.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Library Research yaitu : penelitian lewat buku-buku, majalah-majalah, karya ilmiah dan sejenisnya yang berhubungan dengan teori-teori.
- b. Field Research yaitu : dimana penulis langsung terjun ke lapangan untuk meneliti dan mengambil data maupun fakta yang diperoleh di lapangan.

Cara-cara yang digunakan adalah sebagai berikut : observasi, wawancara, dan menyebarkan angket yang bersifat tertutup.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Random Sampling Sederhana".

Koencaraningrat mengatakan :

Random Sampling Sederhana adalah suatu metode sampling yang berdasarkan probabilitas dimana semua satuan dalam universe yang akan dikenakan pilihan mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih, dan kalau dipilih, maka pilihan itu berdasarkan hukum kebetulan. ²¹⁾

21). Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 25.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARUSJAHE

A. Letak Kecamatan

Kecamatan Barusjahe berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis dan berhawa dingin.

Adapun letak batas-batas lokasi Kecamatan Barusjahe adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Deli Serdang dan Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Tigapanah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Deli Serdang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Merek dan Kab. Simalungun.

Dimana Kecamatan Barusjahe mempunyai jarak sebagai berikut :

- Dengan Ibukota Kabupaten Karo 15 km
- Dengan Ibukota Propinsi 101 km.

B. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Barusjahe berjumlah 17.602 jiwa yang menyebar di 19 Desa.

Pada umumnya desa yang didiami penduduk berhubungan dengan latar belakang sejarahnya, dengan pengertian bahwa desa itu dulunya didiami oleh marga tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Misalnya Desa Kecamatan Barusjahe, dimana pada mulanya desa Kecamatan Barusjahe didiami oleh marga Barus yang terkenal dengan rumah adatnya.

Dengan demikian desa-desa di Kecamatan Barusjahe didominasi oleh marga tertentu. Tetapi hal ini ada sedikit pergeseran dengan datangnya marga lain, yang biasanya karena perkawinan ataupun hal lain, menjadi ikut satu dengan marga tadi, namun mereka yang pertama mendiami desa tersebut tetap mendapat prioritas karena ia merupakan pemuka pendapat di desa tersebut.

Suku Batak Karo terkenal dengan penghasil sayur-mayur dan menganut falsafah hidup banyak anak banyak rejeki, dimana kalau banyak anak maka dengan sendirinya banyak tenaga kerja yang dapat membantu orangtuanya untuk mengerjakan sawah dan ladangnya, karena pada umumnya penduduk tanah karo pekerjaannya adalah bertani.

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KOMPOSISI UMUR

U m u r	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 5 tahun	721	772	1493
6 - 16 tahun	2456	3075	5531
17 - 25 tahun	2540	3042	5582
26 - 55 tahun	1819	2082	3901
56 - keatas	541	554	1095
J u m l a h	8077	9525	17602

Sumber data : Kantor Kecamatan Barusjahe, 1997.

Tabel diatas ini dapat memberikan gambaran tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository.uma.ac.id/9/8/24

Tabel diatas ini dapat memberikan gambaran tentang perbandingan usia kerja dan kelompok usia belum kerja. Supaya tampak jumlah yang konkrit yang sudah bekerja akan menanggung usia kelompok lainnya, maka hal ini dapat dilihat pada tabel berikutnya.

TABEL II
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Petani	16719	94,98
Pedagang	43	0,24
Pengusaha	30	0,17
Pegawai Negeri	423	2,40
Pensiunan	56	0,32
Buruh	171	0,97
Pemakai Jasa	90	0,51
Lain-lain	70	0,37
J u m l a h	17602	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baruejahe, 1997.

Bila jumlah penduduk yang secara konkrit bekerja, maka jumlah penduduk yang masih menjadi tanggungan adalah sekitar 12.948 orang. Dari jumlah ini memang ada sebagian yang bekerja membantu orangtua, terutama yang bertani membutuhkan bantuan anaknya diluar jam sekolah, apakah turun kesawah, keladang dan sebagainya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/8/24

Dari tabel ini dapat kita lihat, bahwa penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menempati urutan teratas yakni 94,98% dan disusul dengan pegawai negeri 2,40% dan kelompok lainnya berkisar 0,39%.

Hal ini dapat kita amati bahwa di daerah Kecamatan Barusjahe membentang perladangan yang luas dan sayur-mayur yang menghihijau, serta perkebunan jeruk yang lebat dengan buahnya.

Penduduk Kecamatan Barusjahe masih ada yang buta huruf, kelompok ini pada umumnya yang lahir di bawah tahun 1940-an.

TABEL III
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	7703	43,76
Tamat SD	4817	27,37
S L T P	3174	18,03
S L T A	1530	8,69
Perguruan Tinggi/ Akademi	378	2,15
J u m l a h	17602	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Barusjahe, 1997.

Di Kecamatan Barusjahe penduduk paling banyak memeluk agama Kristen Protestan dan yang lainnya ada yang memeluk agama Katolik, agama Islam, agama Adven, dan agama yang lainnya dan sebagainya.

TABEL IV
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA

A g a m a	Jumlah	Persentase
Protestan	9697	55,09
Katolik	6471	36,76
I s l a m	1380	7,84
Lain-lain	54	0,31
J u m l a h	17602	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Barusjahe, 1997.

Organisasi politik maupun kemasyarakatan tidak ketinggalan berkecimpung di Kecamatan Barusjahe, ada yang independen ada pula yang bernaung di bawah organisasi kekuatan sosial politik tertentu. Organisasi-organisasi itu adalah :

GOLKAR, P.P.P., P.D.I., SOKSI, AMPI, dan FKPPi

Sumber data : Kantor Kecamatan Barusjahe, 1997.

C. Sosial Budaya

Daerah Kecamatan Barusjahe adalah daerah adat, dimana adat ini berfungsi sebagai titik acuan dalam hidup bermasyarakat. Adat ini tergambar pada sistim kekeluargaan, dimana adat itu adalah suatu cara mengatur bagaimana sistim sosial budaya yang ada di Kecamatan Barusjahe adalah wujud dari sistim budaya Batak Karo, yang mempengaruhi segala tindak tanduk masyarakat. Karena itu bila ada suku lain yang bermukim di daerah ini akan menuruti sistim tadi. Selain itu budaya Batak Karo tidak menutup diri akan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, misalnya baik sistim sosial maupun sistim budayanya telah dipengaruhi kehadiran agama terutama agama Kristen. Pada sisi lain sistim pemerintahan yang dipakai sebagai konsentrasinya bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia turut mempengaruhi realitas sosial budaya tadi.

D. Keadaan Alam

Di muka sudah dijelaskan bahwa Kecamatan Barusjahe berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Dengan demikian maka hawanya dingin, karena itu maka cocok untuk menanam sayur-sayuran. Di Kecamatan Barusjahe, tanahnya bisa dikatakan subur jadi tidak begitu susah untuk mengusahainya dan inilah salah satu faktor yang terpenting penyebab penduduk di Kecamatan Barusjahe pada umumnya penghidupannya adalah dari hasil pertanian dan penduduknyapun kebanyakan pekerjaannya bertani.

Salah satu hasil pertanian yang terkenal dari daerah Kecamatan Barusjahe adalah jeruk. Dan hasil dari tanaman tuanya adalah : jeruk, cengkeh, dan lain sebagainya.

E. Keadaan Pemilu 1997

Data yang dihimpun dari desa penelitian maupun dari kantor Kecamatan Barusjahe, membuktikan bahwa kampanye pemilu dinominasi oleh Golkar. Team kampanye Golkar sampai keseluruh pelosok desa.

Menurut pengakuan responden bahwa di desapun terjadi kampanye antara mereka, dimana tokoh Golkar yang bersama dengan tokoh desa melangsungkan proses penyampaian pesan politik ke masyarakat pemilih. Dari tingkat nasional hadir tokoh Golkar pusat berpidato di tanah lapang dan arak-arakan sepanjang jalan. Hal ini semua dilakukan oleh Golkar.

Partai Demokrasi Indonesia juga tidak ketinggalan dalam berkampanye di desa-desa untuk menarik simpatisan dan juga medatangkan juru kampanye dari ibukota Kabupaten untuk menyemarakkan kampanye tersebut.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan tidak mengadakan kampanye di wilayah Kecamatan Barusjahe.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan bab demi bab di atas, maka pada bab yang terakhir ini penulis memberikan beberapa kesimpulan, yang merupakan penegasan uraian-uraian sebelumnya. Disamping itu, penulis juga memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis. Dan diharapkan dapat diterapkan dalam melaksanakan pembangunan nasional khususnya pembangunan masyarakat desa.

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dapat berkembang bila peran komunikasi ditingkatkan. Karena partisipasi tidak mungkin muncul, tanpa diketahui apa dan bagaimana yang akan dilakukan. Dengan demikian perlu dicari bentuk komunikasi yang paling ideal, yang mampu menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Untuk daerah pedesaan komunikasi antar persona merupakan bentuk komunikasi yang paling ideal, karena terintegrasi dengan budaya masyarakat.
2. Pemuka pendapat adalah orang yang dipercayai masyarakat desa. Dengan demikian ia senantiasa dijadikan sebagai tempat bertanya/pengaduan masyarakat. Pemuka

pendapat lebih banyak mencari/menguasai informasi dan memiliki simpati yang lebih tinggi dari masyarakat awam.

3. Pemuka pendapat terdapat pada setiap lapisan masyarakat, sesuai dengan keinginan dan kondisi masing-masing individu dalam masyarakat.
4. Harus diketahui bahwa pendidikan dari masyarakat desa masih rendah. Karena itu belum dapat mengolah sendiri arah dari kebijaksanaan pemerintah. Untuk itu dituntut kemampuan pemuka pendapat dalam merumuskan pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang paling utama untuk mencapai tujuan. Untuk itu pemuka pendapat dapat mengantarkan pesan itu dengan komunikasi antar persona, dengan demikian semakin efektif komunikasi antar persona yang dilakukan pemuka pendapat, maka semakin besar pula partisipasi masyarakat.
5. Radio sebagai media elektronik, sudah dimiliki oleh sebagian masyarakat. Tetapi belum dimanfaatkan sebagai media informasi yang penting. Demikian pula televisi yang hanya dijadikan sebagai hiburan saja. Walaupun sudah ada sebagian orang yang sudah menikmati sebagai fungsi media informasi politik atau pembangunan. Sedangkan media cetak belum masyarakat di desa, sehingga belum kelihatan pengaruhnya.

Namun yang penting untuk diketahui ialah walaupun masyarakat mendapat berita dari media massa, tetapi masih mendiskusikan keabsahan dari berita itu kepada pemuka pendapat atau kawan-kawannya.

6. Juru kampanye yang hadir berkampanye di desa, belum dapat menetapkan sikap dan partisipasi masyarakat, tetapi hanya menumbuhkan kecenderungan dalam masyarakat. Setelah kampanye itu selesai, masyarakat kembali mendiskusikannya dan disitulah pemuka pendapat hadir. Ternyata pendapat dari pemuka pendapat inilah yang diterima dari pada juru kampanye.
7. Arus komunikasi bukan hanya berjalan dua tahap, tetapi multi step flow of communication. Hal ini dibuktikan, sesudah pemuka pendapat menghimpun materi pesan dari media massa dan orang lain lalu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat masih mendiskusikannya.

B. Saran-saran

1. Pemuka pendapat memiliki pengaruh yang perkasa di desa. Karena itu pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan hendaknya menjadikan pemuka pendapat sebagai duta-duta pembangunan.
2. Hendaknya dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum, setiap orang yang terkait di dalamnya senantiasa memperhatikan nilai budaya yang hidup di desa

dan diharapkan tidak memanipuler demi kepentingan pribadi/golongan.

3. Dengan mutlaknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentu harus memikirkan dampak dari partisipasi masyarakat itu, yakni makin berkembangnya rasa ingin tahu dari masyarakat. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat harus menciptakan komunikasi positif antara masyarakat itu sendiri, rakyat dengan pemerintah maupun antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan masyarakat itu sendiri.
4. Dalam menetapkan kebijaksanaan, hendaknya pakar-pakar ilmu komunikasi diikutsertakan dalam penggoda-kannya. Misalnya dalam penelitian untuk melacak metode yang paling ideal agar dapat digunakan di lapangan serta jenis media mana yang paling sesuai diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, Stenberg, Kampanye Politik Dalam Praktek, alih bahasa, M. Sidarto, PT. Inter Masa, Jakarta, 1981.
- Arifin, Anwar, Strategi Komunikasi, Armico, Bandung, 1984.
- Budiarjo, Meriam, Partisipasi Dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Depari, Edward dan Adrews, Colin, Mac, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Effendy, Onong Uchyana, Dimensi-dimensi Komunikasi, Alumni, Bandung, 1982.
- Gie, The, Liang, Ilmu Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.
- Feisher, A, Teori-teori Komunikasi, Penyunting, Rahkmad, Jalaluddin, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Hanafi, Abdillah, Memahami Komunikasi Antar Manusia, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Kansil, CST, Menjadi Warga Negara Pancasila, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Komaruddin, Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis, Angkasa, Bandung, 1986.
- Pamuji, S, Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Pratikno, Ryono, Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Sutrisno Hadi, Metode Riset, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Pssykologi, UGM, Jakarta, 1982.
- Praktikno, Ryono, Lingkar-an-lingkar-an Komunikasi, Alumni, Bandung, 1982.
- Rahkmad, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja, Karya, Bandung, 1982.
- Rogers, Everett, M, Komunikasi Dan Pembangunan, LP3ES, 1986.